

SINERGITAS DALAM PERCEPATAN PENANGANAN KASUS STUNTING DI KOTA SERANG

Andi Setiawan¹, Rizal Muttaqin²

^{1,2} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya

Dikirimkan: 07 Februari 2023

Direvisi: 27 September 2023

Diterbitkan: 30 September 2023

INTISARI

Angka stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4% dan tergolong tinggi. Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten memiliki kasus stunting tinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pemerintah Kota Serang membuat program *sercing* untuk penguatan sinergitas antar lembaga dalam penanganan stunting. Lembaga-lembaga tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana sinergitas dalam penanganan stunting di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sinergitas Michael Doctoroff dengan empat variabel utama yaitu komunikasi efektif, umpan balik cepat, kepercayaan dan kreativitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting di Kota Serang belum berjalan dengan baik, hal ini karena kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat yang mengakibatkan angka stunting masih tinggi di Kota Serang.

KATA KUNCI

Kasus Stunting, Percepatan, Sinergitas

Pendahuluan

Penelitian ini membahas upaya penanganan kasus stunting (Kerdil) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang melalui strategi sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pembahasan yang disajikan mengulas tentang pihak yang terlibat dalam sinergitas tersebut dan bagaimana hubungan yang terjalin diantara masing-masing OPD. Penelitian ini diawali dengan angka prevalensi kasus stunting di Indonesia yang masih berada pada angka 24,4 % atau 5,33 juta balita pada tahun 2021

(Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 2021). Angka prevalensi kasus stunting tersebut masih dianggap sangat tinggi oleh pemerintah sehingga membuat kebijakan berupa pemetaan fokus stunting pada daerah yang terparah. Provinsi banten yang merupakan satu dari lima provinsi dengan kasus stunting terparah juga mendapatkan perhatian yang serius.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, tingkat stunting di Provinsi Banten pada 2021 sebesar 24,5%. Sementara itu, berdasarkan e-PPGBM prevalensi stunting Provinsi Banten pada tahun 2019 sebesar 15,43 poin, tahun 2020 sebesar 10,38 poin, dan pada tahun 2021 sebesar 7,4 poin (Sangkala, 2022). Berdasarkan data inputan e-PPGBM, presentase di Provinsi Banten dari tahun 2019 sampai 2021 memang sudah ada penurunan, namun pemerintah Provinsi Banten menargetkan target penurunan stunting pada level angka 12 atau 13% di tahun 2024 (Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, 2021). Berdasarkan data olahan SSGBI 2021, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak berada pada kategori zona stunting berwarna kuning dalam kadar prevalensi 20 sampai 30%. Kota Tangerang Selatan serta Kota Tangerang masuk pada kategori zona stunting hijau dengan prevalensi 10 hingga 20%. Sedangkan Kabupaten Pandeglang masuk katagori zona merah stunting dengan prevalensi tertinggi yakni 37,8% atau jumlah stunting terbanyak se-Banten (Kompas.com, 2022).

Terlepas dari daerah mana yang lebih besar kasus stuntingnya di Provinsi Banten, peneliti tertarik untuk membahas stunting di Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi. Ketertarikan ini karena kasus stunting di Kota Serang disebabkan oleh masalah yang tidak biasa seperti karena faktor pola asuh dan pengetahuan yang kurang baik, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki tempat mandi cuci kakus (MCK) sehingga buang air besar sembarangan (BABS) di sejumlah daerah di Kota Serang menjadi hal lumrah dan sudah menjadi budaya (Rifa, 2020).

Dalam upaya penanganan kasus stunting tersebut, Pemerintah Kota Serang menjalankan strategi berupa meningkatkan sinergitas antar lembaga diantaranya melalui Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS). Lembaga-lembaga terkait penanganan stunting di Kota Serang yakni Dinas Kesehatan sebagai pionir pelaksana Intervensi Gizi Spesifik berkaitan dengan kesehatan, dibantu oleh OPD lainnya yang bergerak pada intervensi gizi sensitif (non-kesehatan) seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sinergitas dalam penanganan stunting pertama kali dilakukan dengan mengimplementasikan program pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan bayi sejak 1000 hari awal kehidupan atau disebut Gerakan HPK (Hari Pertama Kehidupan). Program ini bukanlah program baru melainkan program yang didasari Perpres 72 Tahun 2021. Dalam program ini menekankan bahwa pentingnya ketersediaan asupan gizi yang baik dan ketersediaan kebutuhan pendukung seperti air bersih dan lingkungan yang bersih.

Dalam implementasinya program ini melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari PKK, hingga organisasi perangkat daerah yang berwenang seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kelompok PKK berperan sebagai pelaksana teknis dan lapangan dalam menjalankan program yang telah di sosialisasikan. Sedangkan OPD lain berperan dalam membuat inisiasi program pelaksanaan serta melakukan sosialisasi dan memonitoring pelaksanaan program.

Namun satu hal yang menjadi temuan besar bahwa sinergitas dalam

implementasi program ini tidak berjalan dengan baik di Kota Serang. Berdasarkan hasil riset di Dinas Kesehatan Kota Serang, salah satu alasan program tersebut tidak berjalan baik karena belum adanya wadah bersama yang menjadi dasar program untuk masing-masing lembaga yang terkait dan hanya menjalankan perintah pusat saja. Hal ini tergambar dari belum adanya penurunan yang signifikan dari kasus stunting di Kota Serang meskipun presentase setiap tahunnya menurun.

Presentase angka stunting di Kota Serang masih di angka 23,4% dan tergolong tinggi (Media Banten, 2022). Selain itu, hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwanti yang menunjukkan bahwa kegagalan dalam implementasi program gerakan 1000 hari pertama kehidupan disebabkan oleh kurang efektifnya atau tidak adanya keterlibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam program ini yaitu pemerintah, organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan, dunia usaha, dan mitra pembangunan atau organisasi (Purwanti, 2021).

Melihat hal tersebut Pemerintah Kota Serang melakukan terobosan dalam upaya serius untuk memperbaiki sinergitas dalam penanggulangan kasus stunting di Kota Serang. Sinergitas ini dibungkus dalam satu program baru yang memang memfokuskan sinergitas dalam penanggulangan stunting. Program ini diberi nama Sercing (Serang Cegah Stunting). Dalam implementasinya gagasan program ini berupaya menguatkan peran Dinas Kesehatan Kota Serang bersama seluruh OPD dan melibatkan Kader PKK tingkat Kecamatan untuk menuntaskan kasus stunting.

Dalam sinergitas ini ada beberapa OPD yang terlibat diantaranya adalah Dinas Kesehatan sebagai OPD utama yang bertindak dari sisi kesehatan untuk memastikan kualitas kesehatan di Kota Serang dalam kondisi yang baik, sehingga dapat menurunkan kasus stunting. DP3AKB yang berperan secara teknis melalui kader PKK tingkat kecamatan memiliki peran sebagai sub pelaksana teknis lapangan yang mendukung implementasi program. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mengurus tentang pengelolaan lingkungan termasuk sampah, Dinas Perkim yang mengurus tentang kelayakan lingkungan tempat tinggal khususnya ketersediaan MCK, Dinas Pendidikan yang melakukan pencegahan sejak dini melalui penyuluhan di sekolah, dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan terkait bantuan pangan dan penyuluhan kreativitas pengelolaan makanan bergizi. Masing-masing OPD tersebut berperan sebagai sub pelaksana atau pendukung secara administrasi dan operasional.

Dengan strategi ini Pemerintah Kota Serang tetap mengacu pada Lokasi Khusus dalam pengentasan kasus stunting. Daftar Kelurahan Lokasi Fokus Pelaksanan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Serang Tahun 2022 diantaranya:

1. Kecamatan Curug (Kelurahan Curug Manis, Kelurahan Suka Jaya, Kelurahan Kemanisan, Kelurahan Cipete) lokasi di Puskesmas Curug.
2. Kecamatan Walantaka (Kelurahan Teritih, Kelurahan Pager Agung) lokasi di Puskesmas Kalodran.
3. Kecamatan Cipocok Jaya (Kelurahan Cipocok Jaya) lokasi di Puskesmas Cipocok Jaya.
4. Kecamatan Serang (Kelurahan Unyur, Kelurahan Lopang, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kaligandu) lokasi di Puskesmas Unyur, Singandaru.
5. Kecamatan Taktakan (Kelurahan Taman Baru) lokasi di Puskesmas Taktakan.
6. Kecamatan Kasemen (Kelurahan Kasemen, Kelurahan Warung Jaud, Kelurahan Kilasah, Kelurahan Terumbu, Kelurahan Mesjid Priyayi).

Penjelasan diatas membuat peneliti tertarik untuk membahas mengenai sinergitas antar *stakeholder* dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kota

Serang. Secara khusus sinergitas antar *stakeholder* yang terjadi dilihat pada implementasi kebijakan yang difokuskan dalam penanganan stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sinergitas yang terjadi antar *stakeholder* dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting di Kota Serang. Serta untuk mengetahui faktor yang menghambat sinergitas antar *stakeholder* dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting di Kota Serang.

Selain itu jika dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, dkk (2021) bahwa dalam penelitian tersebut menyoroti tentang adanya ego sektoral dalam pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan stunting. Kasus stunting kerap kali dianggap hanya kasus masalah kesehatan sehingga seluruh penanganan dilimpahkan pada Dinas Kesehatan. Padahal jika dikaji lebih dalam menunjukkan bahwa penanganan stunting dibagi menjadi dua antara kesehatan dan non kesehatan. Selain itu dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penanggulangan stunting tidak cukup hanya dengan penanggulangan melalui intervensi gizi spesifik saja. Intervensi gizi sensitif atau penanggulangan stunting yang dilakukan oleh antar sektor sangat diperlukan untuk menanggulangi dampak tidak langsung dari stunting. Penelitian ini menemukan bahwa sharing tanggung jawab pemerintah terhadap stunting, baik secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal, antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi kunci atas strategi penanggulangan stunting. Artinya adanya sinergi antar pemerintahan atau diantara OPD terkait menjadi salah satu upaya tepat dalam menyelesaikan persoalan stunting.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yang mana lokasi penelitian dilakukan di lembaga yang terkait dengan kebijakan ini. Data penelitian bersumber dari data primer yaitu hasil wawancara, dan data sekunder berupa data pendukung dari hasil observasi maupun dokumen dan hasil penelitian terdahulu. Untuk pengumpulan data itu sendiri dilakukan dengan wawancara dan studi dokumenter. Dari data yang sudah ada tersebut maka peneliti akan menganalisis data dengan tahapan pertama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teori Sinergitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori sinergitas untuk menganalisis hubungan sinergi yang digunakan oleh *stakeholder* dalam mengimpelentasikan program penanganan stunting di Kota Serang. Sinergitas berasal dari bahasa Yunani *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergitas sebagai suatu bentuk hubungan sinergi yang tercipta dari sebuah proses atau interaksi dan menghasilkan suatu keseimbangan harmonis sehingga mampu atau diharapkan menghasilkan sesuatu yang optimum. Penciptaan sinergitas dapat terjadi didalam hubungan sinergi dengan beberapa syarat utama yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Menurut Covey sinergitas adalah hubungan komunikasi tingkat tertinggi yang terbentuk atas integrasi dan kerjasama yang tinggi dari beberapa individu dalam sebuah kelompok atau organisasi sosial (Covey, 2015). Sinergitas dapat terbangun dari rasa kepercayaan, adanya rasa keterbukaan, kerjasama yang baik antar individu untuk membentuk sebuah kreatifitas guna menemukan pemecahan masalah atau ide baru dalam alternatif jalan ketiga (jalan tengah) tanpa menimbulkan konflik sosial dengan individu lain.

Sinergitas dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas muncul ketika bagian-bagian organisasi saling berinteraksi untuk menghasilkan dampak gabungan yang lebih besar daripada apabila dilakukan sendiri oleh masing-masing bagian. Untuk mencapai kondisi

yang sinergi atau demi menghasilkan output yang jauh lebih besar, tidak dapat dihindari bahwa terdapat tingkat kebergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Sinergitas yang baik harus mampu menghadapi tantangan atau masalah yang menjadi penghambat tercapai tujuan organisasi dengan analisis medan kekuatan. Menurut Covey, analisis medan kekuatan diartikan situasi yang saling tergantung, sinergi sangat kuat dalam menghadapi kekuatan negatif yang bekerja melawan pertumbuhan dan perubahan (Covey, 2015). Lewin mengembangkan model "*Force Field Analysis*" yang menggambarkan setiap tingkat kinerja saat ini atau sebagai keadaan keseimbangan antara kekuatan pendorong yang mendorong gerakan ke atas dan kekuatan pengekang yang menghambatnya (Covey, 2015). Kekuatan pendorong umumnya positif, masuk akal, logis, sadar, dan ekonomis. Dalam perjalanannya, kekuatan penahan sering negatif, emosional, tidak logis, tidak sadar, dan sosial atau psikologis. Kedua kekuatan itu sangat nyata dan harus diperhitungkan dalam menghadapi perubahan.

Sinergitas memiliki makna membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, dengan perilaku utama yaitu memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati, serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Sinergitas dapat terbangun diantara aktor atau individu dengan membangun kepercayaan. Kondisi saling mempercayai harus dibangun walaupun memerlukan waktu. Ini penting karena kepercayaan (*trust*) yang bijak dan cerdas adalah hal yang dapat mengubah sesuatu atau mewujudkan dinamika menuju perubahan yang diharapkan.

Menurut Covey mengartikan sinergisitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul (Doctoroff, 1977). Covey meambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Dalam melihat apakah sinergi yang dilakukan memiliki nilai positif dalam perkembangan organisasi, Michael Doctoroff mengungkapkan setidaknya ada 4 hal yang perlu dimiliki, diantaranya:

1. Komunikasi yang Efektif: Doctoroff menyatakan, Komunikasi yang efektif dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik baik skala individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman terhadap objek yang dibahas antara komunikator dan komunikan. Menurut Larson dan Knapp komunikasi yang efektif terjadi apabila komunikator dan komunikan memiliki persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa (Abidin, 2013)
2. Umpan balik yang cepat: Umpan balik yang cepat dianalogikan doctoroff seperti sebuah piano. Doctoroff menyatakan bahwa organisasi moodern saat ini tidak mampu memberikan ruang untuk memberikan umpan balik yang cepat. Pemberian umpan balik biasanya memakan waktu lama karena harus mengikuti hierarki yang ada. Terhambatnya upaya untuk memberikan umpan balik yang cepat dapat menghambat terciptanya sistem sinergi yang ideal.
3. Kepercayaan: Menurut Doctoroff, saling berkaitan dengan umpan balik. Apabila ada rasa percaya, maka upaya umpan balik akan dapat dilakukan dengan mudah. Kepercayaan dimulai dengan membuat diri kita terlebih dahulu dapat dipercaya. Untuk menciptakan suasana penuh kepercayaan, masing-masing individu harus memiliki keinginan untuk saling terbuka.
4. Kreativitas: Doctoroff menyatakan bahwa penyelesaian konflik memerlukan

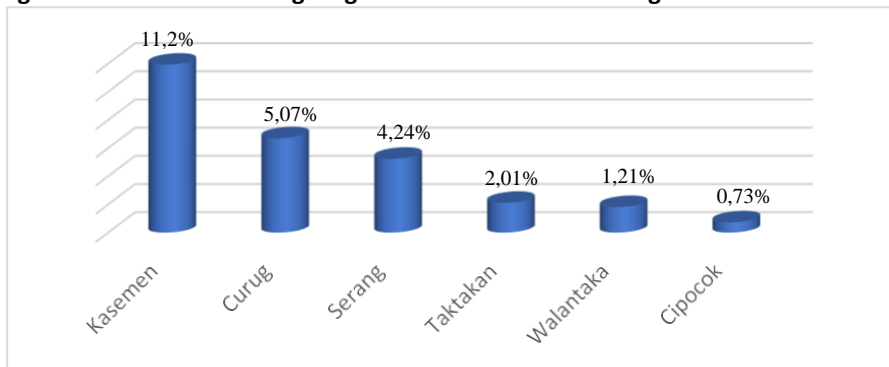
keaktivitas. Doctorof juga menjabarkan proses sebuah kreativitas yaitu pengenalan masalah, pengumpulan informasi, lalu yang terakhir adalah proses inkubasi. Proses inkubasi ini maksudnya adalah menunggu lahirnya sebuah ide. Proses inkubasi ini memerlukan pikiran yang tenang namun tetap konsentrasi (Doctoroff, 1977).

Stunting di Kota Serang

Tingginya angka kelahiran berbanding lurus dengan masih tingginya angka stunting dan keluarga risiko stunting di Kota Serang. Berdasarkan data hasil pendataan keluarga tahun 2021, jumlah keluarga risiko stunting di Kota Serang sebanyak 52.204 keluarga dari total 158.540 keluarga. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Serang karena dampak buruk yang ditimbulkan diantaranya; Penurunan kognitif pada anak dan meningkatkan kerentanan penyakit pada masa anak dan dewasa. Menurunkan 11% produk domestik bruto dan potensial kehilangan pendapatan pekerjaan sebanyak 20% serta melebarnya kesenjangan ekonomi sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang, angka Prevalensi kasus stunting di Kota Serang tahun 2021 sebesar 23,4%. angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 29,5% dan tahun 2019 sebesar 38,6%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat lima kelurahan yang berada dalam kondisi stunting kronis. Dalam kondisi lainnya pada hasil rekap data 2021 dari angka 23,4% angka stunting di Kota Serang, berikut urutan kecamatan yang memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi hingga terendah: Kasemen sebesar 11,2%, Kecamatan Curug sebesar 5,07%, Kecamatan Serang 4,24%, Kecamatan Taktakan 2,01%, Kecamatan Walantaka 1,21%, dan Kecamatan Cipocok Jaya 0,73%.

Bagan 1. Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan Kota Serang Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang (2022)

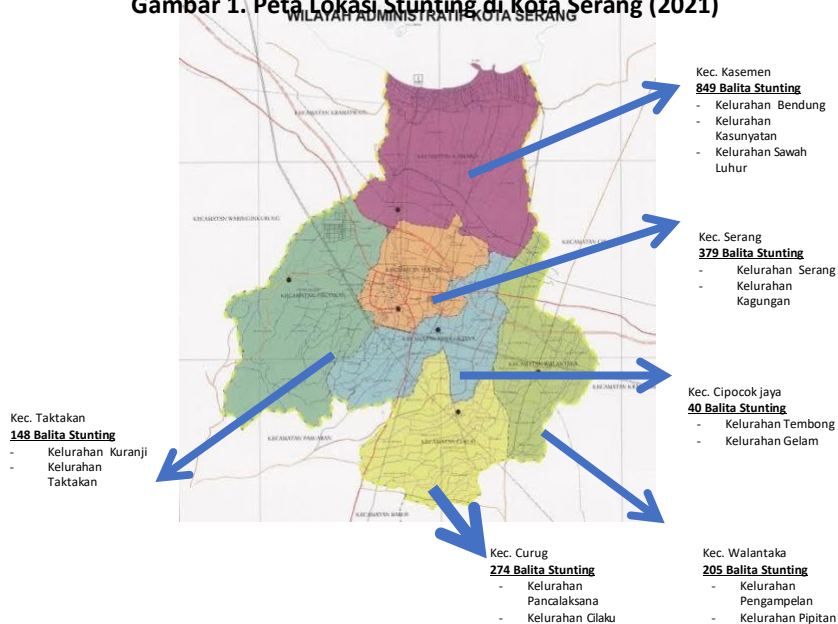
Table 1. Sebaran Balita Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Risiko Stunting	Jumlah Balita Stunting
1	Serang	15.126	379
2	Kasemen	8.721	849
3	Walantaka	7.908	205
4	Curug	4.789	274
5	Cipocok Jaya	7.975	40
6	Taktakan	7.685	148
Jumlah		52.204	1895

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang (2022)

Dari data di atas, untuk menyelesaikan kasus stunting di Kota Serang, Dinas Kesehatan melakukan pembagian daerah fokus stunting yang akan diprioritaskan dalam penanganan stunting. Hingga saat ini terdapat dua belas kelurahan yang difokuskan sebagai lokasi khusus penanganan stunting dimana terbagi kedalam lima kecamatan. Lokasi khusus adalah lokasi yang memiliki angka kasus stunting tertinggi di Kota Serang. Berikut adalah gambaran lokasi fokus penanganan stunting:

Gambar 1. Peta Lokasi Stunting di Kota Serang (2021)



Sumber : Peta pemetaan stunting Dinas Kesehatan Kota Serang

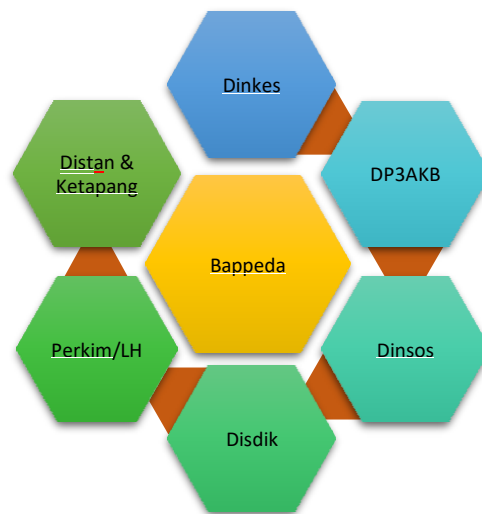
Berdasarkan gambar diatas dapat dijabarkan mengenai lokasi fokus penanganan stunting di Kota Serang terdapat tiga belas lokasi khusus yang tersebar di 6 kecamatan diantaranya adalah:

1. Kecamatan Taktakan : 148 Balita/Kasus, tersebar di Kel. Kuranji dan Kel. Taktakan
2. Kecamatan Curug : 274 Balita/kasus, yang tersebar di Kel. Pancalaksana dan Kel. Cilaku.
3. Kecamatan Walantaka : 205 Balita/kasus yang tersebar di Kel. Pengampelan dan Kel Pipitan

4. Kecamatan Cipocok Jaya : 40 Balita/kasus yang tersebar di Kel Tembong dan Kel. Gelam.
5. Kecamatan Serang : 379 Balita/kasus yang tersebar di Kel. Serang dan Kel Kagungan.
6. Kecamatan Kasemen : 849 Balita/kasus yang tersebar di Kel. Bendung, Kel. Kasunyatan, dan Kel. Sawah Luhur.

Dalam penanganan stunting di Kota Serang terdapat sinergitas yang dilakukan antar Organisasi Perangkat Daerah. Terdapat OPD yang berperan dalam sinergitas ini dengan perannya masing-masing diantaranya.

Gambar 2. Stakeholder Dalam Penanggulangan Stunting Kota Serang



1. Bappeda Kota Serang: Terkait pemetaan dan pengalokasian anggaran stunting untuk masing-masing OPD yang terlibat.
2. Dinas Kesehatan: menangani terkait intervensi spesifik dalam penanganan stunting seperti sosialisasi stunting Bersama dengan ibu PKK, pemberian vitamin pada ibu menyusui dan bayi, membuat makanan tambahan untuk balita, agenda rutin dan imunisasi dasar lengkap, serta controlling pemberian asi eksklusif oleh ibu menyusui.
3. DP3AKB khususnya Ibu PKK: setiap melaksanakan rembuk stunting atau seminar konvergensi stunting, kader PKK selalu terlibat sampai eksekusi kegiatan dilapangan.
4. Dinas Sosial: Mengontrol terkait jaminan Kesehatan dengan cara memastikan anak yang terkena gizi buruk memiliki kartu JKN (BPJS Kesehatan). Karena bayi gizi buruk nantinya mengalami stunting yang kemudian oleh pemerintah daerah dibayarkan atau dijamin fasilitas kesehatannya.
5. Dinas Pendidikan: Melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan gizi pada tingkat Paud/TK sampai tingkat SMA.
6. Dinas Perumahan dan Permukiman: Mengontrol lokus stunting dengan melihat sanitasi air bersih dan jamban. Karena masih ditemukan lokus stunting di kota Serang (daerah kasemen dan cipocok jaya) yang masih tidak punya jamban. Khususnya kasemen, belum semua kelurahannya menjadi daerah ODF (*open defecation free*/bebas BAB sembarangan).

7. Dinas Lingkungan Hidup: Mengontrol lokus stunting dengan melihat kondisi lingkungan dan pembuangan sampahnya.
8. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan: Melakukan kegiatan pelatihan kader pangam Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA). Gerakan B2SA dan program lainnya yakni Gerakan Masyarakat Gemar Ikan (Gemarikan) untuk menyadarkan masyarakat pentingnya memakan ikan. Kegiatan memakan ikan bersama hingga membagikan bantuan ikan kepada anak-anak, ibu hamil dan masyarakat lainnya.

Sinergitas Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kasus Stunting di Kota Serang

Pakar utama dari penyebab terjadinya stunting adalah perilaku kebiasaan masyarakat itu sendiri, diantaranya faktor pola asuh orang tua, pendidikan dan pengetahuan orang tua, faktor kesehatan yang tidak diperhatikan seperti kekurangan gizi pada balita dan kondisi lingkungan kotor, dan kondisi ekonomi. Lalu apakah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk untuk menanggulangi kasus stunting di Kota Serang dapat diselesaikan dengan sinergitas? Pertanyaan ini muncul untuk melihat apakah solusi ini menjadi satu satunya solusi atau hanya sebagai upaya penguatan kebijakan penanganan stunting yang ada. Sebelum melihat kondisi di Kota Serang, terkait pertanyaan diatas telah dijawab oleh beberapa pemerintahan daerah lain. Seperti Pemerintah Kota Solo yang menggambarkan bahwa penanganan stunting di Kota Solo sangat di pengaruhi besar oleh adanya sinergi dan kolaborasi antar OPD yang ada. Kasus serupa juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui kebijakan UP GK (Upaya Perbaikann Gizi Keluarga) dan KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) melalui sinergitas dna kolaborasi menjadi kunci dari kesuksesan dalam penurunan stunting.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sinergitas juga menjadi hal yang penting dalam upaya penanganan kasus stunting di Kota Serang. Sinergitas dipilih sebagai upaya memaksimalkan implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD. Sinergitas menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam menyelesaikan kasus stunting di Kota Serang, hal tersebut diperkuat dalam delapan aksi konvergensi penurunan stunting tingkat Kota Serang. Aksi Konvergensi merupakan instrument dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan integrasi antar elemen / *stakeholder* yang terlibat dalam intervensi penurunan stunting.

Gambar 3. Delapan Aksi Konvergensi Stunting di Kota Serang



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang (2022)

Delapan Aksi Konvergensi Stunting di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Analisis Situasi: Analisis situasi dilakukan pada tingkat wilayah provinsi untuk menentukan penetapan wilayah lokus stunting di Kota Serang.
2. Rencana Kegiatan: Menitik beratkan semua kegiatan yang ada di kota Serang terintegrasi dengan pencegahan dan penanggulangan stunting, serta percepatan penurunan stunting di tingkat Kota Serang.
3. Rembuk Stunting: Adanya komitmen bersama dalam percepatan dan penurunan stunting di Tingkat Kota Serang. Peningkatan lintas sectoral dan sosialisasi bersama untuk melaksanakan penurunan prevalensi stunting.
4. Peraturan Pemerintah/Bupati/Walikota: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting yang diinterpretasi pada program sercing.
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM): Proses edukasi dan pembinaan yang terlibat dalam kategori KPM dilaksanakan sesuai dengan regulasi pemerintah Kota Serang.
6. Sistem Manajemen Data: Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa untuk mendukung pelaksanaan aksi integrasi penurunan kasus stunting di Kota Serang.
7. Pengukuran dan Publikasi Stunting: Pengukuran dan Publikasi Data Prevalensi Stunting di ambil dari data bulan penimbangan yang dilaksanakan pada bulan September karena pada bulan agustus terdapat pembatasan kegiatan akibat gelombang ke-2 *covid-19*.
8. Review Kinerja Tahunan: Evaluasi mengenai program intervensi stunting yang dilakukan secara sensitif dari hulu ke hilir.

Komunikasi dalam Sinergitas Penanganan Stunting di Kota Serang

Doctoroff menyatakan, Komunikasi yang efektif dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik baik skala individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman terhadap objek yang dibahas antara komunikator dan komunikan. Menurut Larson dan Knapp komunikasi yang efektif terjadi apabila komunikator dan komunikan memiliki persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa. Komunikasi yang biasa terjadi diantara organisasi perangkat daerah tidak pernah jauh dari kata rapat, koordinasi, seminar atau sosialisasi dan sejenisnya. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membahas hal-hal strategis dan juga untuk menyamakan persepsi tentang penanganan stunting serta peran masing-masing OPD. Selain itu komunikasi juga dilakukan melalui sosialisasi dengan masyarakat dan kader PKK tingkat kecamatan yang mendapatkan diskusi khusus.

Dari hasil upaya komunikasi ini juga yang perlu diperhatikan adalah kesamaan persepsi yang diterima yang mana masing-masing OPD memiliki persepsi dan pemahaman yang sama mengenai penanganan stunting di Kota Serang. Hanya saja cara yang dilakukan dapat berbeda beda namun masih memiliki tujuan yang sama. Bukan

hanya pemahaman OPD saja, melainkan kader PKK yang bertugas di Kecamatan Kasemen menunjukkan bahwa kader PKK sudah memiliki persepsi dan pemahaman yang sama mengenai pentingnya upaya penanggulangan stunting. Secara kesadaran pelaksana kebijakan penanggulangan stunting memang sudah sesuai. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Tingginya angka stunting di Kota Serang mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan stunting rendah.

Umpan Balik

Umpan balik yang cepat dianalogikan Doctoroff seperti sebuah piano. Untuk membahas indikator umpan balik dalam sinergitas upaya percepatan penanganan stunting di Kota Serang, ada beberapa hal yang akan dibahas. *Pertama*, mengenai ada atau tidaknya saluran yang disediakan untuk memberikan umpan balik. *Kedua*, mengenai proses tindak lanjut dari umpan balik yang telah didapat. Seperti biasa saluran umpan balik yang biasa digunakan oleh pemerintah adalah kanal saran dan masukan baik secara manual ataupun melalui media yang digunakan oleh pemerintah. Dalam sinergitas percepatan penanganan stunting di Kota Serang sudah memiliki sarana untuk memberikan umpan balik diantara *stakeholder* yang berperan. Sarana ini terbuka dalam sisi waktu, dalam artian masing-masing *stakeholder* dapat memberikan pendapat kapan saja. Namun secara aktif pemberian umpan balik ini akan dilakukan saat kegiatan rapat, sosialisasi, dan berbagai kegiatan lainnya, sehingga komunikasi dua arah bisa langsung terjadi. Kondisi ini dapat terjadi saat berkoordinasi dengan *stakeholder* OPD dan juga masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat satu media yang pasif digunakan untuk pemberian umpan balik yaitu media sosial. Karena biasanya pemerintah hanya memantau media sosial dan tidak berfokus untuk membahas tentang tanggapan yang ada di kolom komentar. Jika melihat dua kondisi ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya sarana untuk memberikan umpan balik telah tersedia. Hanya saja tidak dilakukan secara sangat masif sehingga masih terdapat cela bahwa umpan balik yang diberikan diluar dari berbagai kegiatan yang dilakukan tidak terlalu di pertimbangkan. Namun hal ini hanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan pengembangan yang lebih baik dan tidak menjadi tolak ukur. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa umpan balik yang dilakukan secara langsung melalui rapat dan juga saat sosialisasi dan seminar kepada OPD dan masyarakat merupakan yang paling terbaik dalam kasus ini. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah tentang pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh OPD masih tidak terlalu tinggi. Masih ditemukan OPD tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam mengintervensi upaya penanganan stunting melalui tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki, terkadang terjadi tumpang tindih kegiatan lain dengan kegiatan diluar program stunting.

Kepercayaan

Menurut Doctoroff, kepercayaan saling berkaitan dengan umpan balik. Apabila ada rasa percaya, maka upaya umpan balik akan dapat dilakukan dengan mudah. Kepercayaan dimulai dengan membuat diri kita terlebih dahulu dapat dipercaya. Untuk menciptakan suasana penuh kepercayaan, masing-masing individu haruslah memiliki keinginan untuk terbuka. Berdasarkan penjelasan diatas mengarahkan bahwa kepercayaan dapat diciptakan dari adanya transparansi dari masing-masing *stakeholder* yang berperan dalam sinergitas upaya percepatan penanganan stunting di Kota Serang.

Transparansi ini mengarahkan pada sisi anggaran masing-masing *stakeholder* yang berperan dalam sinergitas ini. Jika berdasarkan hasil paparan data pada bab sebelumnya seharusnya dalam sinergitas ini sudah dapat diatakan transparan. Pada tahun 2022 terdapat anggaran senilai Rp 36.220.427.730,- (tiga puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah yang berasal dari berbagai OPD diantaranya sebagai berikut:

Table 2. Anggaran Penanganan Stunting Tahun 2022

NO	PELAKSANA	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Dinas Kesehatan	5.767.834.730	DAK Non – Fisik, APBD, APBN, DAK Fisik
2	Dinas PU/Cipta Karya	8.677.703.00	DAK Fisik, APBD
3	Dinas Sosial	17.815.470.000	APBN, APBD
4	Dinas Kominfo	87.100.000	APBD
5	Dinas Ketahanan Pangan	260.700.000	DAK Non – Fisik, APBD
6	BKKBN/Dinas KB	3.600.680.000	DAK Non – Fisik, APBD
7	Bappeda	10.940.000	APBD
JUMLAH		36.220.427.730	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang (2022)

Table 3. Rencana Pemetaan Anggaran Tahun 2023

NO	PELAKSANA	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Dinas PUPR	7.692.732.000	DAK
2	Dinas Kominfo	81.700.000	APBD
3	DP3AKB	4.424.420.000	APBD dan DAK
4	Dinas Ketahanan Pangan	590.000.000	APBD dan DAK
5	Dinas Sosial	787.695.000	APBD
6	Dinas Pendidikan	200.000.000	APBD
7	Bappeda	35.000.000	APBD
8	Dinas Kesehatan	6.119.284.500	APBD dan DAK
JUMLAH		19.930.831.500	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang (2022)

Dinas kesehatan dan beberapa dinas lainnya yang tergabung dalam sinergitas ini berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan transparansi. Hal ini juga diungkapkan oleh Dinas Kesehatan tentang betapa pentingnya transparansi dalam sinergitas ini. Transparansi dianggap menjadi satu kunci terjalinnya hubungan yang baik dan berkelanjutan antara masing-masing OPD.

Kreatifitas

Doctoroff menyatakan bahwa penyelesaian konflik memerlukan kreativitas. Doctoroff juga menjabarkan proses sebuah kreativitas yaitu pengenalan masalah, pengumpulan informasi, lalu yang terakhir adalah proses inkubasi. Proses inkubasi ini maksudnya adalah menunggu lahirnya sebuah ide. Proses inkubasi ini memerlukan pikiran yang tenang namun tetap konsentrasi. Sebelum memunculkan kreatifitas atau ide/gagasan dalam penanganan stunting terlebih dulu akan dilakukan analisis kondisi dan pemetaan masalah. Analisa kondisi dan pemetaan masalah sebagai langkah awal untuk menentukan solusi atau sebuah program dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan

tupoksinya masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan adanya sebuah rembuk bersama yang dilakukan mengingat program yang akan dilaksanakan melibatkan beberapa OPD yang ada.

Dari hasil Analisa kondisi dan pemertaan masalah inilah yang nantinya akan memunculkan satu hasil solusi baru yang akan dijadikan sebagai upaya penyelesaian masalah khususnya stunting. Selanjutnya disini penulis akan memaparkan mengenai program-program yang termaksud dalam kreativitas masing-masing OPD untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Satu wadah utama dari sinergitas antara OPD di Kota Serang adalah Program Sercing. Sebagai gambaran program sercing merupakan program yang di inisiasi oleh Dinas Kesehatan, dan hingga saat ini program Sercing telah memberikan dampak yang cukup baik pada upaya penurunan angka stunting.

Salah satu kreatifitas yang muncul dalam penanganan stunting adalah program SERCING. Sebagai bagian dari implementasi program Sercing, berikut adalah beberapa program yang dijalankan secara bersinergi antar OPD dalam upaya pengentasan stunting di Kota Serang.

a. Program Pencegahan Stunting Sejak Dini

Program pertama yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah program pencegahan stunting sejak dini. Program ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting pada remaja, Ibu Hamil, Balita, hingga di sekolah. Dalam program ini terdapat beberapa Dinas yang bekerjasama diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DP3AKB. Kegiatan yang ada dalam program tersebut diantaranya:

- 1) Remaja Cegah Stunting : Pelatihan kepada PMR di tingkat SMP dan SMA mengenai stunting
- 2) Cegah Stunting dari Ibu Hamil
 - a. Pemeriksaan kesehatan selama kehamilan
 - b. PMT (Pemberian makanan tambahan) ibu hamil yang tergolong kurang energi kronis.
 - c. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil (90 tablet selama kehamilan)
 - d. Pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil (seperti cek hb → *screening anemia* ~~lu~~hamil)
 - e. Penyuluhan kesehatan selama kehamilan
 - f. Konseling ASI
 - g. Dukungan pemberian ASI Eksklusif
- 3) Pencegahan Stunting Sejak Bayi dan Balita di implementasikan melalui:
 - a. Pembentukan Pos gizi bagi anak stunting
 - b. Validasi alat antropometri di posyandu
 - c. Pemberian tambahan makanan
 - d. Peningkatan Kapasitas Kader PKK dalam pemberian makan bayi dan anak
- 4) Pencegahan dari Sekolah diimplementasikan melalui:
 - a. Melakukan Kerjasama antara Guru Paud/TK, wali murid dan Dinas Pendidikan untuk pelayanan kesehatan di tingkat Paud/TK
 - b. Pembentukan dokter kecil di tingkat SD
 - c. Konseling dan sosialisasi mengenai urgensi kesehatan calon ibu dan bayi di tingkat SMA/Sedrajat
- 5) Calon Pengantin Cegah Stunting
 - a. Pemeriksaan kesehatan
 - b. Pelatihan kesehatan reproduksi
 - c. Pendampingan catin

d. Pelatihan tentang rumah tangga, dll

Berdasarkan kelima kegiatan tersebut OPD yang bertindak didalamnya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DP3AKB. Masing-masing OPD memiliki peran dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Seperti Dinas Kesehatan berperan sebagai pemilik kebijakan sekaligus yang menjalankan kebijakan hingga melakukan evaluasi dari program tersebut. Dinas Pendidikan bahwa perannya dalam program ini adalah menjalankan program secara keberlanjutan di sekolah seperti membuat media sosialisasi, menyelenggarakan seminar dan sosialisasi bersama dengan Dinas Kesehatan. DP3AKB berperan sebagai pendukung upaya pencegahan stunting dan juga terlibat melalui Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader penggerak PKK, Bidan, dan Kader KB/IMP.

b. Program Lingkungan Bersih untuk Cegah Stunting

Program kedua dalam upaya penanggulangan stunting di Kota Serang adalah Program Lingkungan Bersih. Program ini masih menjadi satu dengan program Sercing, hanya saja pelaksana program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Permukiman. Dari dua dinas tersebut memiliki program berbeda namun masih menjalin komunikasi dalam pelaksanaannya. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Serang merupakan OPD dalam sinergitas menjalankan program pembangunan Jamban bagi masyarakat di Kecamatan Kasemen.

Program 1000 jamban bagi masyarakat ini untuk menanggulangi gaya hidup yang kurang bersih dimasyarakat. Sehingga jika permasalahan ini teratasi dapat mendukung upaya pencegahan stunting yang lebih maksimal, sayangnya karena banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban, pemerataan distribusi program jamban belum maksimal. Selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang memiliki peran sama sebagai pendukung upaya pencegahan terjadinya stunting. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berfokus pada intervensi sensitif. Dinas ini fokus program pada permasalahan sampah di Kota Serang karena sampah menjadi permasalahan lingkungan yang berpotensi membawa penyakit apabila pembuangan dan penyelesaiannya terganggu, karena lingkungan yang tercemar oleh sampah menimbulkan potensi penyakit. Hal ini juga sangat berlaku di Kecamatan Kasemen. Melihal hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berupaya melaksanakan dua program diantaranya Bank Sampah dan Pembuangan Sampah Terpadu di Kecamatan Kasemen.

Dari masing-masing peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Permukiman, sinergitas ini terjadi dari atas dasar koordinasi sehingga kegiatan tersebut memiliki tanggungjawab yang jelas untuk menciptakan lingkungan yang bersih di masyarakat. Dari hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan Perangkat Desa terkait untuk memastikan implementasi pelaksanaan program khususnya pada program 1000 jamban gratis bagi warga. Program ini dirasa memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan karena mengurangi kebiasaan masyarakat untuk buang air di belakang rumah. Selain itu juga meminimalisir adanya sumber penyakit.

c. Program Jaminan Sosial dalam Pencegahan Stunting

Program ketiga yang menjadi bagian dari program Sercing adalah program jaminan sosial. Pada program ini OPD yang terlibat adalah Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Sama halnya dengan Program lingkungan bersih, dalam program ini sinergitas terjalin atas dasar koordinasi berdasarkan dampak yang ditimbulkan. *Pertama*, peran dari Dinas Sosial Kota Serang adalah berfokus pada pemerataan pengguna BPJS Kesehatan khususnya bagi keluarga yang memiliki risiko atau yang telah dipantau karena stunting. Selain pemerataan penggunaan BPJS

Kesehatan, Dinas Sosial juga menginisiasi untuk tanggungan tagihan tersebut dibebankan dalam anggaran Pemerintah Kota Serang sebagai upaya memaksimalkan dampak yang diterima. Hal ini didasarkan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dianggap kurang mampu. Jika masyarakat dengan ekonomi tidak mampu harus dibebankan lagi pada iuran BPJS maka sudah dipastikan manfaat BPJS tersebut tidak akan dirasakan oleh masyarakat.

Kedua, peran dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang merupakan OPD pada intervensi gizi sensitif non-kesehatan dalam penanganan stunting di Kota Serang. Adapun dilakukan untuk membantu pencegahan stunting adalah Melakukan kegiatan pelatihan kader pangan Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA). Peserta pada kegiatan tersebut adalah masyarakat, TP PKK, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Serang. Gerakan B2SA ditujukan meningkatkan motivasi, keterampilan dan kesadaran masyarakat khususnya ibu rumah tangga guna mengolah makanan ke arah beragam dan bergizi seimbang, dan program lainnya yakni Gerakan Masyarakat Gemar Ikan (Gemarikan) untuk menyadarkan masyarakat pentingnya memakan ikan. Kegiatan memakan ikan bersama hingga membagikan bantuan ikan kepada anak-anak, ibu hamil dan masyarakat lainnya. Dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan dalam jangka panjang. Berdasarkan dari paparan tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga program yang dijalankan secara bersinergi yaitu program pencegahan stunting sejak dini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan DP3AKB. Selanjutnya ada program Lingkungan Bersih yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Serta yang terakhir adalah program jaminan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang.

Hambatan Dalam Penanganan Stunting di Kota Serang

1. **Pemahaman Masyarakat Terkait Urgensi Stunting** : Pelaksanaann sosialisasi dan penyuluhan program stunting pada tiap-tiap lokus stunting di Kota Serang sudah dilakukan. Namun, pada beberapa daerah yang memiliki kasus stunting dan rawan stunting yang tinggi disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya stunting, banyak yang beranggapan bahwa stunting seperti penyakit biasa yang dapat sembuh sendirinya. Daerah kasemen menjadi daerah yang tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan pencegahan stunting yang disebabkan masih banyak ditemukan kegiatan buang air besar sembarangan dan pemberian makanan kurang bergizi pada balita.
2. **Pemahaman OPD Terkait Urgensi Prevalensi Stunting**: Berdasarkan data paparan rembuk stunting Dinas Kesehatan 2022, pemahaman pada masing-masing OPD mengenai penurunan stunting masih menjadi permasalahan, karena masih ditemukan beberapa anggota lembaga terkait yang belum paham tentang urgensi penurunan kasus stunting.
3. **Anggaran Penanganan Stunting di Kota Serang**: Anggaran penanganan stunting menjadi konsen yang cukup menghambat pelaksanaan program/pembiayaan intervensi gizi prioritas karena terhambat oleh efisiensi anggaran program pemulihan dan penanganan *Covid-19*. Selain itu, amggaran untuk program/kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD terkait, umumnya masih bersifat makro dan belum terfokus pada lokus (kelurahan) dimana kegiatan konvergensi penurunan stunting akan dilaksanakan. Hal tersebut tergambar pada paparan anggaran Dinas Kesehatan yang masih bersifat umum/makro.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sinergitas ini telah memiliki sarana untuk berkomunikasi dan dianggap efektif seperti rapat, pelatihan, dan seminar diantara masing-masing OPD serta melalui sosialisasi kepada masyarakat dan Kader PKK. Berbagai cara ini dianggap efektif dilakukan karena menyesuaikan pada situasional kebutuhan dan pembahasan yang akan dilakukan. Selain itu, melalui pertemuan langsung membuat masing-masing pihak memiliki kesamaan pemahaman dan persepsi yang sama. Namun dalam perjalannya, masyarakat banyak yang belum menerapkan terkait upaya pencegahan stunting. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat yang mengakibatkan angka stunting masih tinggi pada beberapa daerah di Kota Serang. Umpan balik dilakukan secara langsung oleh masing-masing OPD. Hal ini karena umpan balik yang diberikan pada saat pertemuan secara langsung akan direspon secara cepat. Namun yang perlu diperhatikan bahwa hingga saat ini ternyata pemahaman, persepsi, dan kesadaran OPD lain di luar dari Dinas Kesehatan masih belum tinggi. Sehingga banyak OPD dalam pelaksanaannya masih tumpang tindih dengan tupoksi program lain diluar upaya pencegahan stunting di Kota Serang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing OPD telah berupaya melakukan transparansi mengenai anggaran yang digunakan untuk melakukan upaya pencegahan stunting di Kota Serang baik pada saat rapat internal lembaga maupun rapat koordinasi antar lembaga.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Pendidikan, DP3AKB dan Masyarakat Kecamatan Kasemen Kota Serang karena telah memberikan informasi dan data selama penelitian lapangan.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Aprilia Dwi Purwanti, 2021, Hambatan Dalam Implementasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan: A Review, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.1 No.6
- Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, *Strategi Penanggulangan Stunting di Banten*, Diakses dari (<https://penghubung.bantenprov.go.id/Artikel/topic/1435>)
- Bahtiar Rifa, *Walikota Serang Sebut 29 Ribu Warganya Belum Punya Jamban*, Diakses dari (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4912482/walkot-Serang-sebut-29-ribu-warganya-belum-punya-jamban>)

- Covey, Stephen (2015), *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif)*, Jakarta: PT Dunamis Intra Sarana
- Damayanti, R., Nugroho, A. B., Triarda, R., & Sari, I. P. (2021). Peleburan ego sektoral: strategi menurunkan stunting di Trenggalek. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 197-216.
- <https://ppid.Serangkota.go.id/detailpost/rembug-aksi-konvergensi-percepatan-penurunan-stunting-di-kota-Serang>
- Kompas, *Banten Duduki Peringkat Kelima Angka Stunting Terbanyak di Indonesia*, Diakses dari (<https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/191640578/banten-duduki-peringkat-kelima-angka-stunting-terbanyak-di-indonesia>)
- Media Banten, *Kadinkes Banten: Angka Stunting di Kota Serang Wajib Turun*, Diakses dari (<https://mediabanten.com/kadinkes-banten-angka-stunting-di-kota-Serang-wajib-turun>).
- Michael Doctoroff, 1977, *Synergistic Management : Creating The Climate For Superior Performance*, Amacom.
- Maulidya, Ade. (2020). *Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro. Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol.4, No.2.
- Pandu, Akbar (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. Vol.2, No.1
- Purwanti, Aprillia Dwi. (2021), Hambatan Dalam Implementasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan: A Review, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.1, No.6
- Rahmadhita, Kinanti. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol.11, No.1
- Sani, Kiki Rasmala. (2019). Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, Vol.10, No.1.
- Saputri, Rini Archad. (2019), Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol.2, No.2.
- Simbolon, Demsa. Suryani, Desri. Yorita, Epti (2019), Prediction Model and Scoring System in Prevention and Control of Stunting Problems in Under Five-Year-Olds in Indonesia, Bengkulu Health Polytechnic Ministry of Health, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.15, No.2
- Sulasmi, Siti. (2009). Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, Vol.13, No.2
- Suryanata, I. G. N. P. (2019). Sinergisitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.16, No.1.
- Sutarto. Mayasari, Diana. Indriyani, Reni. (2018), Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya, *Jurnal Agromedicine*, Vol.5, No.1.
- Utaminingsih, Alfiatulahatin. Absari, Intan Etika. (2021). *Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang. Tanah Pilih*, Vol.1, No.2.
- Stephen Covey, 2015, *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif)*, Jakarta: PT Dunamis Intra Sarana

Wibowo Sangkala, *Pemprov Banten Kerahkan 53 Ribu kader Tanggani Stunting*. Diakses dari (<https://mediaindonesia.com/nusantara/477144/pemprov-banten-kerahkan-53-ribu-kader-tanggani-stunting>)

Zainal Abidin, 2013, *Pengertian Kounikasi, Arti Penting Komunikasi, Jenis dan Proses Komunikasi, Komunikasi yang efektif*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Tentang Penulis

Andi Setiawan, Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Brawijaya.

Rizal Muttaqin, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya.